

Pengaruh Efektivitas PAD, Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

The Impact of Local Revenue Effectiveness, Budget Efficiency, and Capital Expenditures on Local Government Financial Performance

Sherly Pratiwi*, Rusliyawati, Ira Grania Mustika

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, 78124, Pontianak, Indonesia

Email: ¹*b1031231189@student.untan.ac.id, ²rusliyawati@ekonomi.untan.ac.id, ³ira.grania.mustika@ekonomi.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: b1031231189@student.untan.ac.id

Submitted: 31/08/2026; Revised: 20/10/2026; Accepted: 25/10/2026; Published: 27/10/2026

Abstrak—Tujuan dari studi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Barat dari tahun 2021 hingga 2025 dipengaruhi oleh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif yang menggunakan laporan keuangan daerah yang diambil dari web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sampel terdiri dari 14 wilayah yaitu 2 kota dan 12 kabupaten sehingga menghasilkan data panel sebanyak 70 observasi. Penelitian ini di analisis regresi data panel dilakukan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan perangkat *EViews 14*. Hasil pengujian secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan dengan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan *probability* 0.0126, sedangkan Efisiensi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dengan *probability* 0.1188. Sebaliknya, Belanja Modal menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dengan *probability* 0.0000 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, pada tahun berjalan akibat pengorbanan likuiditas kas daerah untuk investasi jangka panjang. Secara simultan (Uji F), ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa variasi kinerja keuangan daerah dengan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.922437 atau 92,24% yang mampu dijelaskan dengan teori yang berkaitan, sedangkan sisanya sebesar 7,76% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pencapaian target PAD, mengubah penghematan anggaran menjadi efisiensi yang berdampak pada kinerja, dan meningkatkan kualitas belanja modal.

Kata Kunci: Efektivitas PAD; Efisiensi Anggaran; Belanja Modal; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract—The objective of this study is to examine how the financial performance of local governments across all regencies and cities in West Kalimantan from 2021 to 2025 is influenced by the effectiveness of local revenue (PAD), budget efficiency, and capital expenditures. This study employs a quantitative approach with an associative design, utilizing local government financial reports obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The sample consists of 14 regions 2 cities and 12 regencies resulting in a panel dataset of 70 observations. Panel data regression analysis was conducted using the Fixed Effects Model (FEM) approach with *EViews 14* software. The results of the partial tests (t-test) show that the effectiveness of PAD has a positive and significant effect on local government financial performance with a probability of 0.0126, whereas budget efficiency does not have a significant effect on local government financial performance with a probability of 0.1188. Conversely, Capital Expenditures showed a significant negative effect with a probability of 0.0000 on Local Government Financial Performance in the current year due to the sacrifice of local government cash liquidity for long-term investments. Simultaneously (F-test), these three independent variables collectively have a significant effect on local government financial performance, indicating that variations in local financial performance with an adjusted R-squared value of 0.922437, or 92.24% can be explained by the relevant theory, while the remaining 7.76% is influenced by other factors outside the research model. These results provide a basis for local governments to prioritize achieving local revenue targets, shift from budget cuts to efficiency measures that impact performance, and improve the quality of capital expenditures.

Keywords: Effectiveness of Local Revenue; Budget Efficiency; Capital Expenditures; Local Government Financial Performance

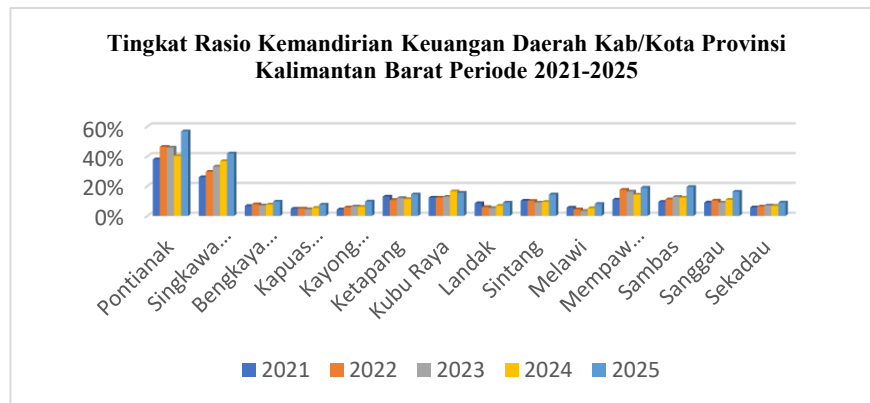
How to Cite: Pratiwi, S., Rusliyawati, R., & Mustika, I. G. (2026). Pengaruh Efektivitas PAD, Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 7(3), 864-877. <https://doi.org/10.47065/jbe.v7i3.11112>

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab dan berkualitas tinggi di tingkat kabupaten dan kota sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif yang menguntungkan masyarakat. Sejak reformasi, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan pemerintah daerah banyak kebebasan untuk merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas keuangan mereka sendiri. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), hanya sebagian kecil kabupaten dan kota yang telah mencapai tingkat otonomi keuangan yang cukup. Sebaliknya, lebih dari setengah pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi anggaran mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa kekurangan kapasitas keuangan pemerintah daerah Indonesia bukan hanya masalah administratif atau teknis, masalah struktural yang berdampak pada dasar tata kelola fiskal daerah. Sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal di Indonesia menjadikan efisiensi anggaran dan kualitas pengeluaran pemerintah daerah sebagai indikator utama

keberhasilan otonomi daerah. Anggaran daerah (APBD) harus dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah. Fokus khusus adalah belanja modal karena alokasi mereka secara langsung membantu pembangunan aset tetap daerah dan memfasilitasi penyediaan layanan publik dalam jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), anggaran provinsi Kalimantan Barat (APBD) tahun 2023 akan dilaksanakan sebesar Rp 24.888,3 miliar, atau 92,50% dari total anggaran, dengan alokasi belanja modal sebesar Rp 4.556,24 miliar. Meskipun pengeluaran secara keseluruhan relatif tinggi, biaya investasi memiliki tingkat pemanfaatan terendah dibandingkan dengan kategori pengeluaran lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterlambatan proses tender dan masalah cuaca yang menghambat pengiriman bahan baku untuk proyek. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat alokasi dana anggaran tidak secara otomatis memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien untuk mendukung kinerja keuangan daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kalimantan Barat pada tahun 2022 hanya 21,16%, masuk kategori "sedang", sementara Rasio Derajat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat 73,05% dan Rasio Kemandirian Fiskal 28,97% dalam pola hubungan "konsultatif". Memasuki tahun 2023, tidak ada perbaikan yang signifikan. Rasio Desentralisasi Fiskal hanya sedikit naik ke 22,64%, Ketergantungan turun ke 77,11%, dan Kemandirian Fiskal tetap stagnan di 30,50%.



Gambar 1. Tingkat Rasio Kemandirian Daerah Kab/Kota Prov. Kalbar 2021-2025

Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat rasio kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2021–2025 menunjukkan kesenjangan kapasitas fiskal yang signifikan dan cenderung berlanjut. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika dilihat pada tingkat kabupaten dan kota. Kota Pontianak dan Singkawang selalu memiliki rasio kemandirian tertinggi. Pontianak bahkan akan mencapai 55% pada tahun 2025. Namun, situasi ini hanyalah satu-satunya 1 kasus, dan tidak mencerminkan provinsi secara keseluruhan. 12 kabupaten lainnya, seperti Kapuas Hulu, Kayong Utara, Melawi, dan Sekadau, hanya dapat bertahan di kisaran 5–15% dari 2021–2025 tanpa tren kenaikan yang signifikan. Dilihat dari pola ini, kapasitas fiskal Kalimantan Barat sangat terkonsentrasi di dua pusat kota, sementara mayoritas kabupaten masih tergantung pada ketergantungan struktural. Ketika dilihat dari sudut pandang realisasi belanja, masalah menjadi semakin rumit. Menurut kajian fiskal regional DJPB, belanja APBD Kalimantan Barat hanya mencapai 25,34% dari pagu belanja 26,9 triliun pada Triwulan II 2023, yang terus meningkat hingga menyentuh 55,47%, masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu pos yang paling mengkhawatirkan adalah belanja modal, yang secara konsisten mencatatkan realisasi paling rendah dibandingkan dengan pos belanja lainnya yang mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman material proyek yang disebabkan oleh gangguan cuaca. Selain itu, data konsolidasi kabupaten/kota menunjukkan bahwa potensi kas yang belum dioptimalkan mencapai Rp1.209,43 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp1.414,68 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penyerapan anggaran yang buruk menyebabkan penumpukan uang kosong. Terdapat tiga aspek yang membuat penelitian ini baru yang dimana penelitian ini melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dari dua variabel independen yaitu efisiensi anggaran dan belanja modal secara bersamaan. Selain itu juga mencakup semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, ini memberikan gambaran yang lebih luas daripada penelitian sebelumnya yang melihat hanya satu variabel secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan dan aktual tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks politik saat ini, karena periode penelitian 2021-2025 mencakup fase pemulihan pascapandemi serta perubahan terbaru dalam kebijakan fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk memiliki rantai dampak yang langsung berdampak pada pembangunan dan kualitas layanan publik, yang dimana masalah teknis ini tidak dapat diabaikan (Ardelia et al., 2022). Dengan belanja modal yang rendah dan terus berkontraksi, infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan tidak akan dibangun sesuai rencana. Hal ini ironis mengingat amanat UU HKPD No. 1 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa infrastruktur pelayanan publik harus dialokasikan minimal 40% dari total belanja APBD. Dengan demikian, SiLPA akan menumpuk hingga Rp3,59 triliun pada 2025, yang berarti dana publik yang seharusnya mengalir ke perekonomian tetap berada di rekening pemerintah. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar kabupaten dalam tingkat rasio yang kemandirian fiskalnya hanya 15% dari 2021 hingga 2025, kemandirian fiskal daerah sangat tergantung pada transfer pusat. Perubahan kebijakan pusat, seperti kebijakan efisiensi anggaran 2025, yang

mengakibatkan penurunan belanja modal sebesar 40,66%. Hal ini semakin penting untuk Kalimantan Barat yang dimana periode 2021–2025 mewakili siklus fiskal penting, mulai dari pemulihan setelah pandemi COVID-19 pada 2021, konsolidasi fiskal pada 2022–2023, normalisasi pada 2024, dan tekanan baru akibat kebijakan efisiensi nasional pada 2025. Selama periode ini, belum ada penelitian menyeluruh yang dilakukan untuk seluruh 14 kabupaten/kota secara bersamaan. Jika efektivitas pengelolaan anggaran, efisiensi anggaran, dan belanja modal tidak dipahami secara empiris dan bersamaan pada saat ini, intervensi kebijakan fiskal daerah berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya anggaran terus dibuang, kesenjangan pembangunan antardaerah meningkat seperti yang ditunjukkan pada tingkat rasio dan tujuan kemandirian fiskal yang ditetapkan dalam UU HKPD No. 1 Tahun 2022 masih sulit dicapai.

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah belum diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Rahmadini et al. (2024) menyelidiki hubungan antara kinerja keuangan daerah, yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi yang dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi berdampak positif pada alokasi belanja modal. Namun, arah kausalitas yang dipelajari bertentangan dengan tujuan penelitian karena penelitian ini menganggap belanja modal sebagai variabel dependen daripada variabel independen yang memengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup semua kabupaten di Kalimantan Barat secara khusus, sehingga tidak dapat menggambarkan perbedaan yang sangat berbeda dalam kemandirian fiskal antara kota dan kabupaten, yang ditunjukkan oleh tingkat rasio kemandirian fiskal. Dengan menggunakan pendekatan rasio deskriptif tanpa pengujian inferensial, sejumlah studi deskriptif, seperti penelitian di Kota Palu yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2025), menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja secara parsial pada satu pemerintah daerah saja. Seberapa besar dan signifikan pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan tidak dapat ditentukan oleh penelitian ini. Selain itu, karena wilayahnya sangat terbatas, temuan mereka tidak dapat digeneralisasi untuk provinsi dengan heterogenitas fiskal setinggi di Kalimantan Barat.

Kajian tentang determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah berkembang luas, tetapi temuannya belum konsisten, terutama untuk belanja modal. (Insani et al., 2023) menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Jambi periode 2019–2021 berpengaruh positif dan dana perimbangan berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan diukur melalui rasio kemandirian, sedangkan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit tidak berpengaruh. Pada provinsi Kalimantan Barat, (Fahmi et al., 2023) menguji pengaruh PAD dan belanja modal pada 14 kabupaten/kota dengan periode 2018–2022, yang hasilnya dilaporkan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan derajat desentralisasi. Namun, koefisien belanja modal pada tabel regresi bernilai negatif, sehingga arah pengaruhnya perlu ditafsirkan hati-hati. (Lestari et al., 2024) menganalisis karakteristik pemerintah daerah di Kalimantan Barat tahun 2017–2021. Tingkat kekayaan daerah (PAD) dan status daerah (kota atau kabupaten) berpengaruh positif, ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif, dan belanja modal tidak signifikan. Penelitian ini juga memperlihatkan disparitas yang tajam. Rasio kemandirian Kota Pontianak berkisar 37,9–52,56%, sedangkan Kabupaten Kayong Utara hanya 4,27–6,77%. Rata-rata ketergantungan pada transfer pusat mencapai 74,09% dan belanja modal hanya sekitar 22,68% dari total belanja. (Nuraini & Saleh, 2023) menggunakan analisis jalur pada 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat periode 2012–2020, hasilnya menunjukkan kemandirian dan efektivitas keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal memediasi pengaruh keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dimana variabel terikatnya pertumbuhan ekonomi, bukan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hummel & Kusumasari, 2025) melihat ukuran kinerja keuangan daerah menggunakan data dari 66 kota dan wawancara di empat kota, daripada menggunakan model regresi data panel. Ukuran ini termasuk desentralisasi, kemandirian, belanja langsung, dan pertumbuhan pendapatan.

Dari hasil penelitian yang terdahulu terdapat beberapa kesenjangan, dilihat dari sisi variabel, Penghasilan Asli Daerah pada umumnya diukur menggunakan rasio kemandirian, sehingga efektivitas PAD yang direalisasikan terhadap target serta efisiensi anggaran belum di analisis bersama belanja modal sebagai penjelas kinerja keuangan. Selain itu, belum ada penelitian yang mencakup secara menyeluruh seluruh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dari periode 2021–2025. Interval waktu ini sangat penting karena mencakup transisi dari fase pemulihan ekonomi pascapandemi hingga munculnya tekanan fiskal baru yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional. Namun, analisis sebelumnya hanya mencapai tahun 2022. Dari sisi metode, studi yang menggunakan Kalimantan Barat sebagai objek menggunakan perangkat SPSS 25 tanpa pemilihan mode data panel. Penghasilan Asli Daerah dimuat pada pembilangnya karena derajat desentralisasi atau kemandirian variabel terikat, sehingga hubungannya dengan Penghasilan Asli Daerah cenderung bersifat mekanis. Sehingga penelitian ini terdorong untuk menguji efektivitas PAD, efisiensi anggaran, dan belanja modal secara bersamaan dalam model regresi data panel yang digunakan dengan EViews 14, menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik. Selain itu juga menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan dengan regresi data panel pada 14 kabupaten/kota periode 2021–2025 dengan menggunakan *software Eviews 14*, serta menjelaskan hasil tersebut dalam konteks disparitas fiskal antardaerah berdasarkan tingkat rasio kemandirian.

Pendekatan teoretis komplementer yang menggabungkan Teori Agensi (*Agency Theory*) dan *Stewardship Theory*. Menurut Jensen dan Meckling 1976, Teori Agensi menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah daerah (*agent*) dan masyarakat atau pemerintah pusat (*principal*) dapat menyebabkan asimetri informasi. Konflik kepentingan dalam penganggaran dapat terjadi karena hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan penduduk serta pemerintah pusat sebagai *principal*. Penganggaran akan tidak efektif dan efisien jika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* karena asimetri informasi. Agen sering menafsirkan efisiensi secara mekanistik, memangkas anggaran

operasional utama, atau menunda proyek karena tekanan untuk mematuhi persyaratan formal. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja keuangan sebenarnya daerah. Akibatnya, komitmen untuk investasi produktif jangka panjang dalam bentuk belanja modal sering diabaikan demi belanja saat ini, yang secara politis lebih mudah dilaksanakan, meskipun lebih sulit untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran adalah sistem kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Selain itu, *Stewardship Theory* dalam akuntansi sektor publik menekankan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja modal secara efektif untuk menghasilkan aset dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pada akhirnya, upaya ini menghasilkan peningkatan kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui metrik seperti efisiensi, otonomi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018; Halim et al., 2019).

Penelitian ini hadir dengan fokus yang spesifik menganalisis secara bersamaan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2021 hingga 2025 dipengaruhi oleh efektivitas PAD, efisiensi anggaran, dan belanja modal. Penelitian ini bertolak dari fenomena fiskal di atas, masalah empiris yang belum terjawab, dan variasi dalam penelitian sebelumnya. Periode dipilih secara sengaja karena mewakili siklus fiskal yang lengkap, dari pemulihan pasca-pandemi, konsolidasi dan normalisasi fiskal, hingga tekanan kebijakan efisiensi nasional, yang memberikan banyak data yang relevan untuk pengujian empiris. Selain itu studi ini memberikan kontribusi, yaitu menambah kajian mengenai kinerja keuangan daerah dengan melihat efektivitas PAD, efisiensi anggaran, dan belanja modal secara simultan. Hal ini penting karena penelitian sebelumnya cenderung membahas variabel-variabel tersebut secara terpisah, sementara hasil penelitian mengenai belanja modal juga masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Dari sisi empiris dan metodologis, penelitian ini memberikan bukti berdasarkan kondisi pemerintah di kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan menggunakan *software Eviews 14* dengan *Fixed Effect Model* yang memungkinkan perbedaan karakteristik masing-masing daerah tetap diperhitungkan dalam analisis, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi berganda pada data gabungan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangannya, khususnya dalam menentukan aspek yang perlu mendapat perhatian, baik pencapaian target PAD, efisiensi penggunaan anggaran, maupun pengelolaan belanja modal.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menguraikan hubungan kontraktual yang terjadi ketika atasan memberikan otoritas kepada agen untuk mengelola sumber daya. Pemerintah pusat dan masyarakat bertindak sebagai pemimpin dalam organisasi sektor publik, sedangkan pemerintah daerah dan aparat birokrasi bertindak sebagai pengelola keuangan. Asimetri informasi terjadi karena agen memiliki lebih banyak data internal yang menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif, kepercayaan publik yang menurun, dan partisipasi masyarakat yang menurun, sehingga menyebabkan konflik kepentingan di dalam agensi (Sikora-Fernandez & Stawasz, 2024). Teori ini juga menyatakan bahwa pemerintah mendorong penyebaran informasi yang tidak memadai, baik melalui penyebaran informasi yang berlebihan maupun dengan menahan diri untuk mengungkapkannya. Akibatnya, transparansi, audit, dan pelaporan keuangan yang berkualitas dipandang sebagai mekanisme untuk menekan asimetri informasi dan mendorong akuntabilitas. Perspektif ini berpendapat bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dengan mengurangi ketidaksamaan informasi (Jannah et al., 2025). Meskipun demikian, pertanyaan tentang apakah transparansi benar-benar menghasilkan akuntabilitas tetap ada di sektor publik.

2.1.2 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson & Davis (1991), Teori penata layanan atau *Stewardship Theory* memandang manajer atau pemimpin sebagai pelayan (*steward*). Pelayan (*steward*) tidak digerakkan oleh tujuan oportunistik, melainkan berkomitmen menyelaraskan perilakunya dengan kepentingan organisasi. Berbeda dengan teori agensi yang bertumpu pada kontrol, insentif, dan pengawasan untuk menekan asimetri informasi dan moral hazard, teori ini menekankan kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aktor publik (Komala & Ihyani, 2025). Dalam konteks sektor publik terutama pemerintahan daerah, aparatur diposisikan sebagai *steward* yang dipercaya mengelola sumber daya publik demi kepentingan umum (Pratiwi et al., 2022). Hubungannya dengan masyarakat, sebagai pemilik otoritas anggaran, bertumpu pada kepercayaan, bukan semata pengawasan. Pandangan ini menempatkan *stewardship* anggaran sebagai kewajiban moral, sehingga internalisasi nilai penata layanan dipandang sebagai syarat etis dalam pengelolaan keuangan publik (J. K. Saputra, 2026).

2.1.3 *Signalling Theory*

Menurut teori sinyal (*Signalling Theory*), sebuah entitas dapat mengirimkan isyarat atau sinyal yang dapat diandalkan tentang kualitas internalnya kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi yang dimana termasuk dalam kerangka teoritis yang dipertakan dalam kajian administrasi publik (Hattke & Vogel, 2023). Dalam konteks sektor publik,

instansi pemerintah berfungsi sebagai pengirim sinyal (*signaler*) dengan memanfaatkan instrumen komunikatif seperti menyediakan transparansi anggaran, laporan keuangan, dan pengungkapan kinerja. Sinyal itu ditujukan kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Studi tentang pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang berkinerja baik cenderung mengungkap informasi lebih luas untuk menekan asimetri informasi dan menandai akuntabilitas mereka kepada publik (Yusmita & Kurniawan, 2026).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam akuntansi sektor publik, kinerja keuangan pemerintah daerah dipandang sebagai akuntabilitas fiskal atas pengelolaan dana publik yang menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran. Kinerja ini menggambarkan keberhasilan, efisiensi, dan efektivitas daerah dalam mengelola APBD untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Pengukurannya lazim memakai analisis rasio APBD, salah satunya rasio kemandirian yang menunjukkan kemampuan daerah membiayai urusannya dari pendapatan sendiri, sehingga menjadi indikator otonomi fiskal dan kapasitas mengelola sumber daya publik (R. D. Putri & Hendaris, 2025). Kewenangan fiskal yang lebih luas tidak otomatis menghasilkan kemandirian, karena kemandirian daerah masih dipengaruhi dana transfer antarpemerintah (Wahyudi & Astuti, 2026). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung otonomi fiskal, tetapi kemandirian banyak daerah masih sangat rendah (Fitriadi et al., 2025).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100 \quad (1)$$

Teori *Value for Money* (VfM) menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tiga komponen yang terdiri dari ekonomi (penghematan), efisiensi (daya guna), dan efektivitas (Suridiyanti et al., 2024). Dengan menggunakan ketiga aspek ini, kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun anggaran berjalan. Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Barat periode 2019–2022 menggunakan konsep *Value of Money* menghasilkan kategori yang ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif (Oktavianty et al., 2024).

2.1.5 Efektivitas PAD

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat menggerakkan sumber daya keuangan lokal untuk mencapai target. Metode untuk menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian dikalikan 100%. Daerah yang memiliki tingkat produksi yang tinggi tidak otomatis mandiri (Tifani et al., 2023). Berbagai penelitian empiris terbaru menggunakan pengukuran efektivitas PAD untuk menilai derajat kemandirian fiskal dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap wajib pajak lokal. Pengelolaan PAD yang optimal berperan memperkuat kemandirian fiskal dan mencerminkan otonomi fiskal daerah (Hasanah et al., 2025).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \quad (2)$$

Rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masuk akal dan dapat dicapai. Akibatnya, rasio ini bergantung pada keandalan perencanaan anggaran, ketepatan estimasi potensi riil, dan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah (M. S. Saputra & Priyastwi, 2026). Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Mendagri No Efektivitas diklasifikasikan menjadi lima kategori pada tahun 1996, yaitu 100% atau lebih sangat efektif, 90% hingga 100% efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% kurang efektif, dan 60% atau kurang tidak efektif. Keberlanjutan fiskal tidak dapat dijamin hanya dengan mencapai target. Studi yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa PAD dilaksanakan secara konsisten dengan efektif, tetapi kemandirian fiskal masih terpengaruh oleh dana transfer (Wahyudi & Astuti, 2026).

2.1.6 Efisiensi Anggaran

Menurut Maryanti & Munandar (2023), efisiensi anggaran adalah ukuran seberapa baik pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangan (input) secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan (output) tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dalam akuntansi sektor publik, pengelolaan anggaran dinilai tinggi apabila realisasi belanja kurang dari plafon anggaran, tetapi seluruh tujuan program kerja tetap tercapai dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran telah berkurang atau apakah pengeluaran daerah terbuang sia-sia. Indikator rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \quad (3)$$

Sari et al. (2025) menyatakan bahwa pemangkasan anggaran belanja non-prioritas yang dapat diukur akan berdampak positif pada keberlanjutan keuangan daerah. Putra (2021) melakukan penelitian tentang efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Barat dan menemukan bahwa ada perbedaan dalam tingkat efisiensi antara kabupaten; wilayah dengan skor efisiensi belanja yang stabil menunjukkan bahwa mereka meningkatkan kesehatan keuangan regional. Dengan demikian, Pramudita (2022) dan Umam et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga daerah yang mampu menekan

pengeluaran operasional hingga mencapai kategori sangat efisien (<90%) akan memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk dialokasikan untuk belanja modal dan proyek pembangunan jangka panjang lainnya. Hipotesis yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut.

H1: Efisiensi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

2.1.7 Belanja Modal

Belanja Modal adalah Anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020, pengadaan aset tetap yang digunakan untuk modal belanja harus memenuhi tiga kriteria. Aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam operasi pemerintahan daerah, dan memenuhi batas kapitalisasi minimal aset tetap yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dalam akuntansi sektor publik, alokasi belanja modal sangat penting karena hasilnya akan meningkatkan kekayaan lokal, meningkatkan sarana prasarana, dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dalam jangka panjang. Rasio Kecerasan Belanja Modal adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghitung variabel ini. Rasio ini dihitung dengan menghitung bagian alokasi belanja modal jika dibandingkan dengan total belanja daerah yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kecerasan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100 \quad (4)$$

Banyak penelitian sebelumnya dan literatur menunjukkan bahwa belanja modal meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian terdahulu, menemukan bahwa alokasi belanja modal yang tepat sasaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena aset tetap yang produktif memiliki kemampuan untuk memicu stimulus ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi et al., 2022). Belanja modal dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kajian nasional periode 2019-2023 menemukan bahwa belanja modal untuk infrastruktur fisik dan aset jangka panjang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Fadilah & Andriani, 2025). Kenaikan PAD diikuti kenaikan belanja modal, yang menunjukkan bahwa otonomi fiskal memberi ruang untuk berinvestasi. Dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan karena itu bergantung pada kualitas dan efisiensi pelaksanaannya, tidak hanya pada porsinya dalam APBD (Haq et al., 2025). Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

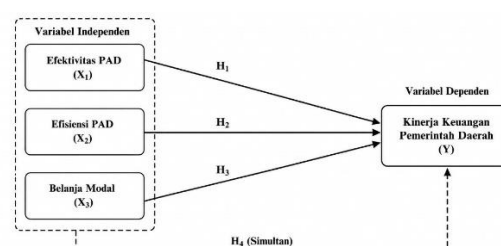
H2: Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

2.3 Jenis Penelitian serta Populasi dan Sampel

Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Metode kuantitatif, yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu. Untuk menguji hipotesis, instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari desain asosiatif adalah untuk mengetahui bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu sama lain. Desain ini menguji bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2022). Kajian keuangan pemerintah daerah di Indonesia sering menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Misalnya, untuk mengevaluasi faktor kemandirian keuangan kabupaten atau kota, pendekatan ini digunakan (Syafri et al., 2024). Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk mengukur frekuensi, menemukan hubungan antar variabel, atau menemukan pola dalam populasi tertentu. Pengambilan populasi sampel menggunakan metode pengambilan sampel jenuh yang melibatkan seluruh pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 14 wilayah yaitu 12 kabupaten dan 2 kota dengan masing masing wilayah diambil APBD sebanyak 5 tahun untuk periode 2021–2025 menghasilkan data panel sebanyak 70 observasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara resmi melalui pencatatan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia djpk.kemenkeu.go.id.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen dan Efektivitas PAD (X1), Efisiensi PAD (X2), dan Belanja Modal (X3) sebagai variabel independen. H1, H2, dan H3 menunjukkan pengaruh variabel terhadap kinerja keuangan secara terpisah, dan H4 menunjukkan pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Teknik Analisis dan Pengujian

2.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), Statistik deskriptif adalah aktivitas pengumpulan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan tujuan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi standar. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tentang karakteristik serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan apa yang dilakukan responden dengan indikator pengukur masing-masing variabel.

2.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel didefinisikan sebagai gabungan data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*), yaitu unit cross section yang sama diamati selama beberapa periode waktu sehingga data memiliki dimensi ruang dan waktu (S. A. Putri et al., 2025). Tiga model utama untuk regresi panel data adalah Model Regresi Data Panel Umum (*Common Effect Model*), Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*), dan Model Efek Acak (*Random Effect Model*).

a. Model Regresi Data Panel Umum (*Common Effect Model*)

Common Effect Model adalah pendekatan paling sederhana untuk menganalisis data panel dengan menggabungkan data deret waktu dan silang tanpa mempertimbangkan perbedaan antar individu atau waktu, dan menggunakan estimasi kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*) (Rowanda & Ismiwati, 2026). Dengan mengabaikan struktur data panel, model ini memperlakukan setiap pengamatan sebagai data *cross-sectional* biasa. Pendekatan ini adalah metode yang paling sederhana, tetapi tidak disarankan jika ada efek waktu atau heterogenitas antar entitas yang perlu dikontrol.

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model efek tetap (*Fixed Effect Model*) menganggap bahwa karakteristik tertentu dari seseorang atau entitas tertentu tidak berubah sepanjang waktu, mempengaruhi variabel dependen. Dengan menggunakan variabel dummy, pendekatan *Fixed Effect Model* mengidentifikasi adanya perbedaan intersep antar individu meskipun slope antar individu tetap atau sama (Anwar & Nursan, 2025).

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \epsilon_{it} \quad (5)$$

c. Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan model efek acak (*Random Effect Model*) menganggap bahwa setiap bisnis memiliki perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel acak atau stokastik sama. Teknik ini juga mempertimbangkan kemungkinan korelasi antara kesalahan sepanjang *cross section* dan *time series*. Menurut Greene (2020), model ini memperlakukan intersep antarindividu sebagai komponen yang acak, karena itu model ini disebut sebagai error component model dan diestimasi menggunakan *Generalized Least Square*.

Dalam analisis regresi data panel untuk menentukan model estimasi terbaik ada tiga jenis pengujian yang digunakan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji Chow digunakan untuk menentukan metode empiris yang paling sesuai antara pendekatan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai *probability cross section* $F < 0.05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect* maka dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan model antara pendekatan model *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect* (FEM). Jika nilai *probability cross section random* < 0.05 model yang terpilih ialah pendekatan *Fixed Effect*. Apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman masing-masing memilih *Fixed Effect Model* (FEM), maka model akhir adalah *Fixed Effect* (FEM), maka pengujian berhenti tanpa perlu melakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

2.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan termasuk Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Namun, karena Uji Durbin-Watson dirancang untuk *data time series* murni dan tidak tepat untuk data panel, jadi dalam penelitian ini Uji autokorelasi tidak dilakukan. Menurut Ghozali (2016), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki variabel independen dan variabel dependen dengan distribusi normal atau tidak normal. Jika distribusi suatu variabel tidak normal, maka hasil Uji statistik akan menurun. Uji multikolinearitas adalah bagian dari pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan atau korelasi linier, sempurna, atau hampir sempurna di antara sesama variabel bebas (independen) dalam model regresi linear. Untuk mengetahui apakah model regresi terbebas dari multikolinearitas, kriteria pengambilan keputusan adalah nilai toleransi lebih besar dari 0.10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, maka dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan kemungkinan ketidaksamaan atau perbedaan varians dari residual, atau kesalahan pengganggu, dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Apabila nilai signifikansi (Sig.) dari Uji statistik seperti Uji Glejser mencapai angka lebih dari 0.05, maka model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

2.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuat kesimpulan tentang populasi dengan data sampel dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu H_0 atau H_1 berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen. Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan untuk uji F digunakan untuk menguji pengaruh keseluruhan variabel independen secara simultan, dengan dinyatakan signifikan apabila hasil dari uji F memiliki nilai signifikansi $F < 0.05$. Pengujian Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan melalui variabel independen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Spesifikasi dan Estimasi Model

Tabel 1. Ringkasan Uji Spesifikasi dan Estimasi Model

Uji	Statistic	Probability	Keputusan	Estimate Model
Uji Chow	Cross-section F	0.0000	< 0.05	FEM
Uji Hausman	Cross-section random	0.0010	< 0.05	FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.656470	0.390708	-6.799118	0.0000
X1	0.321628	0.124566	2.581996	0.0126
X2	0.586609	0.369990	1.585472	0.1188
X3	-2.809159	0.628098	-4.472484	0.0000

Serangkaian Uji formal, termasuk Uji Chow yang menghasilkan nilai *Cross-section F* dengan nilai *probability* 0.0000 < 0.05 dan Uji Hausman menghasilkan nilai *Cross-section random* dengan *probability* sebesar 0.0010 < 0.05 . Maka hasil dari Uji empiris ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini tanpa perlu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

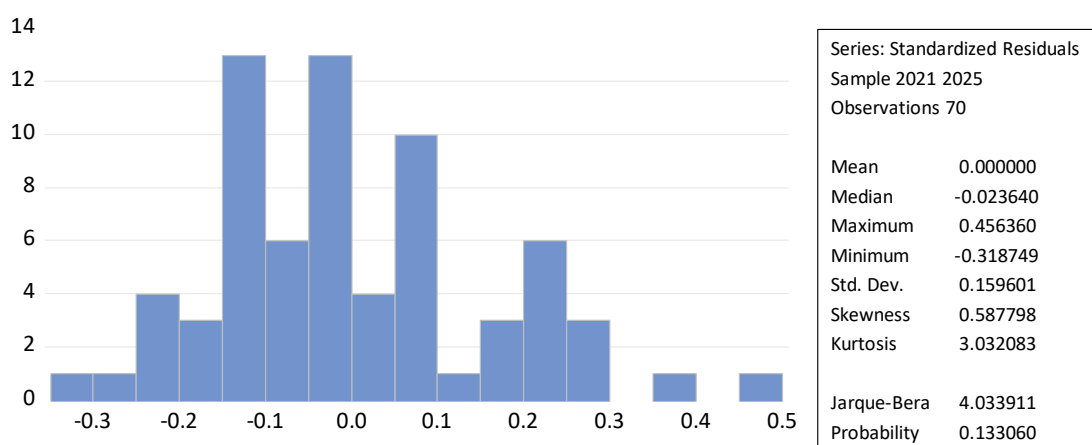
Berdasarkan hasil dari estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa nilai C (konstanta) sebesar -2.656470. Untuk nilai koefisiens setiap variabel yaitu variabel X1: Efektivitas PAD sebesar 0.321628, variabel X2: Efisiensi Anggaran sebesar 0.586609, dan variabel X3: Belanja Modal sebesar -2.809159. Dari hasil koefisien yang diperoleh, dapat disusun persamaan model regresi data panel sebagai berikut.

$$\text{LOG_Y} = -2.656470 + 0.321628 \cdot X1 + 0.586609 \cdot X2 - 2.809159 \cdot X3 + [CX=F] \quad (5)$$

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal setelah variabel kinerja keuangan diubah ke logaritma naturalnya (LOG_Y), pengujian distribusi normal dilakukan dengan Uji *Jarque-Bera* (JB). Berdasarkan hasil dari Uji Normalitas yang disajikan, dilihat dari nilai *probability Value Jarque-Bera* sebesar 0.133060 > 0.05 yang dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021), jika nilai koefisien korelasi antarvariabel independen > 0.85 , akan ada gejala multikolinearitas yang signifikan. Hasil dari matriks korelasi antarvariabel independen X1, X2, dan X3, hubungan antara variabel X1 dan X2 memiliki nilai koefisien korelasi tertinggi, yaitu -0,196199. Sementara itu, nilai korelasi antara variabel X1 dan X3 adalah 0,148407, dan nilai korelasi antara variabel X2 dan X3 adalah 0,139388, yang dimana seluruh nilai korelasi antarvariabel independen < 0.85 , maka dapat disimpulkan model regresi data panel bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 2 . Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.196199	0.148407
X2	-0.196199	1.000000	0.139388
X3	0.148407	0.139388	1.000000

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dinyatakan bebas apabila nilai *probability* dari masing-masing variabel independen harus lebih dari 0.05 dengan meregresikan nilai absolut residual ABS(RESID) untuk seluruh variabel independen (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas dari masing-masing variabel independen, yaitu Efektivitas PAD, Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal memiliki nilai *probability* lebih dari 0.05. Secara statistik dapat disimpulkan model regresi data panel terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.097664	0.216996	0.450073	0.6545
X1	-0.033184	0.069183	-0.479651	0.6334
X2	0.131502	0.205489	0.639947	0.5250
X3	-0.411413	0.348840	-1.179375	0.2435

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Uji T

Berdasarkan hasil dari Uji T yang disajikan menunjukkan estimasi regresi data panel yang dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan kriteria nilai *probability* < 0.05, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diukur melalui Uji t.

Tabel 4. Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
C	-2.656470	0.390708	-6.799118	0.0000
X1	0.321628	0.124566	2.581996	0.0126
X2	0.586609	0.369990	1.585472	0.1188
X3	-2.809159	0.628098	-4.472484	0.0000

Hasil dari Uji t dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan variabel Efektivitas PAD memiliki nilai coefficient 0.321628 dan *probability* 0.0126 yang kurang dari 0.05 hal ini menandakan bahwa variabel Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Sebaliknya variabel Efisiensi memiliki nilai *coefficient* 0.586609 dan *probability* sebesar 0,1188 lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan variabel Efisiensi Anggaran tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sementara itu, variabel Belanja memiliki nilai coefficient -2.809159 dan *probability* 0.0000 kurang dari 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah.

3.3.2 Uji Silmutan (Uji F)

Pengaruh total variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan melalui uji simultan (Uji F). Hipotesis nol (H0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H1) diterima, karena nilai *probability F-statistic* sebesar 0.000000 dan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0.05. Dalam penelitian ini, Uji F dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5. Hasil Uji F

F-statistic	Prob(F-statistic)	Keterangan
52.28738	0.000000	Signifikan

Berdasarkan hasil dari Uji F menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 52.28738 dengan nilai *probability* $0.000000 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas PAD, Efisiensi, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah.

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.940423	Mean dependent var	-2.216749
Adjusted R-squared	0.922437	S.D. dependent var	0.653877
S.E. of regression	0.182106	Akaike info criterion	-0.360948

Sum squared resid	1.757612	Schwarz criterion	0.185115
Log likelihood	29.63318	Hannan-Quinn criter	-0.144045
F-statistic	52.28738	Durbin-Watson stat	1.534959
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil dari Uji Koefisien Determinasi diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.922437 atau 92,24% menunjukkan bahwa perubahan terjadi pada variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah yang dijelaskan secara simultan oleh variabel independen yaitu Efektivitas PAD, Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal, sementara itu hasil dari sisa variasi yaitu 7,76% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Dalam kaitannya dengan Teori Agensi, koefisien determinasi yang tinggi yang hampir sama dengan angka 1 (92,24%) menunjukkan bahwa model tata kelola, atau variabel-variabel intervensi yang di uji dalam penelitian ini, sangat baik untuk menjelaskan dinamika hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*agent*). Konteks ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen yang digunakan telah menggambarkan variasi perilaku oportunistik agen, biaya keagenan (*agency costs*), dan upaya penyelarasan kepentingan melalui mekanisme pengawasan hampir secara sempurna (92,24%). Untuk menilai efektivitas struktur keagenan di dalam organisasi atau perusahaan yang diteliti, model regresi ini dianggap sangat kuat dan relevan. Hal ini karena sisa variasi yang tidak dijelaskan (7,76%) juga menunjukkan bahwa tingkat asimetri informasi yang tidak terdeteksi di luar variabel-variabel model ini sangat kecil. Hasil penelitian ini juga sangat berkaitan dengan Teori Sinyal (*Signalling Theory*), yang dimana nilai *Adjusted R-squared* yang hampir mendekati angka 1 menunjukkan bahwa sinyal positif dan dapat dipercaya oleh pasar atau sumber luar. Sinyal ini menunjukkan bahwa informasi atau variabel independen yang disajikan dalam model memiliki tingkat asimetri informasi yang sangat rendah, memberikan kepastian yang tinggi, dan dapat menjadi indikator yang kuat bagi para pedagang.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik, variabel X1 atau Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di provinsi Kalimantan Barat, yang dimana nilai *coefficient* 0.321628 dan *probability* $0.0126 < 0.05$. Hasil penelitian empiris ini menunjukkan bahwa gambaran kinerja keuangan daerah akan menjadi lebih baik dengan setiap peningkatan konsisten dalam kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan asli daerah.

Secara teoritis, temuan penelitian ini mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*) dalam konteks sektor publik, yang dimana masyarakat (*principal*) memberikan pemerintah daerah tanggung jawab untuk mengelola kekayaan ekonomi lokal. Ketika pemerintah daerah mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini menunjukkan komitmen lembaga untuk mengurangi ketidaksamaan informasi dan memenuhi ekspektasi publik melalui optimalisasi potensi daerah. Kemampuan untuk mengumpulkan PAD secara optimal juga meminimalkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, yang menunjukkan kesehatan keuangan yang lebih baik di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan dasar teoretis, temuan bermanfaat ini sangat relevan dengan *Stewardship Theory* yang menggambarkan aparatur pemerintah daerah sebagai pelayan publik (*steward*) yang bertindak dengan integritas demi kepentingan masyarakat luas (*principal*). Kesuksesan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan komitmen moral pemimpin untuk membangun kemandirian fiskal tanpa didorong oleh dorongan egoistis. Dari perspektif *Signalling Theory*, tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi merupakan sinyal positif atau berita baik yang dikirimkan pemerintah daerah kepada pihak luar, seperti investor dan pemerintah pusat. Sinyal fiskal yang signifikan ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ruang fiskal yang cukup besar dan tidak memiliki risiko ketergantungan dana transfer yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Marini (2023) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas, kemandirian, dan efisiensi PAD menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Realisasi PAD yang melampaui target menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang baik, sehingga ketergantungan dana pada transfer pusat berkurang. Menurut Mardiasmo (2018), ukuran keberhasilan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah yang baik menuntut anggaran dan realisasi pendapatan yang akuntabel serta berorientasi pada kinerja terdapat pada rasio efektivitas.

3.4.2 Pengaruh Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel Efisiensi Anggaran memiliki nilai *coefficient* 0.586609 dengan *probability* $0.1188 > 0.05$, jadi dapat disimpulkan bahwa Efisiensi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025.

Hasil ini menunjukkan perbedaan jika dikaitkan dengan *Stewardship Theory*, yang berasumsi bahwa pelayan publik akan selalu bertindak secara rasional demi kepentingan publik dengan mengurangi pemborosan anggaran. Ketidakefektifan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBD di Kalimantan Barat, efisiensi anggaran seringkali terbatas pada hal-hal administratif atau penyerapan anggaran defensif daripada upaya penghematan yang efektif. Anggaran belanja yang difokuskan pada efisiensi (rasio belanja terhadap target kecil) berisiko menurunkan kualitas output pelayanan publik jika program-program esensial dikurangi. Meskipun dampak penghematan anggaran belanja tidak mengubah kinerja keuangan daerah secara keseluruhan secara statistik, koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya kecenderungan searah. Teori keagenan (*Agency Theory*) dapat digunakan untuk mempelajari fenomena

ketidaksignifikanan ini secara menyeluruh. Salah satu contohnya adalah asimetri informasi, atau asimetri informasi, di mana eksekutif daerah sebagai agen memiliki akses data anggaran yang jauh lebih besar daripada masyarakat sebagai kepala. Di atas kertas, efisiensi yang dicatat hanya bersifat administratif karena kurangnya informasi ini menyebabkan agen cenderung menyerahkan anggaran secara resmi pada akhir tahun anggaran. Menurut *Signalling Theory*, angka efisiensi belanja ini dianggap sebagai gangguan informasi oleh publik karena, di Kalimantan Barat, struktur belanja aparaturnya terlalu mendominasi postur APBD dibandingkan dengan alokasi pelayanan publik yang sebenarnya. Variabel ini tidak signifikan dari perspektif *Stewardship Theory* karena menunjukkan bahwa pengelola daerah lebih berkonsentrasi pada keberlanjutan fungsi operasional pelayanan masyarakat daripada sekadar mengejar label administratif "hemat". Penelitian analisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh menyatakan bahwa pengendalian anggaran yang ketat seringkali tidak berdampak pada kinerja keuangan apabila sebagian besar pengeluaran didominasi oleh belanja operasi seperti gaji pegawai dan belanja barang daripada pengeluaran investasi yang bernilai tambah.

3.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil dari pengujian, variabel Belanja Modal memperoleh nilai *coeficient* -2.809159 dengan *probability* $0.0000 < 0.05$, yang dimana hasil ini membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Arah hubungan negatif yang masif ini mengimplikasikan bahwa setiap perluasan alokasi anggaran untuk Belanja Modal secara mekanis akan menurunkan capaian indikator kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat pada tahun berjalan.

Meskipun tampaknya bertentangan, hubungan negatif ini sangat logis jika dianalisis menggunakan Teori Keagenan (*Agency Theory*) melalui konsep biaya keagenan dan biaya ikatan yang pengalokasian anggaran untuk infrastruktur fisik memerlukan pengorbanan likuiditas kas internal yang sangat besar dalam jangka pendek. Keputusan pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk mengunci dana segar ke dalam aset tetap mengurangi kapasitas kas operasional tahun berjalan, yang mengurangi nilai rasio kinerja keuangan daerah. Namun, konsep sinyal tunda, atau sinyal yang ditunda, digunakan oleh *Signalling Theory* untuk menjembatani anomali penurunan ini. Dalam hal ini, biaya investasi fisik yang besar dikirimkan sebagai sinyal komitmen jangka panjang kepada masyarakat. Sinyal ini menunjukkan bahwa wilayah sedang membangun basis ekonomi produktif baru yang diharapkan akan meningkatkan PAD dan menghasilkan pengembalian. Jika dikorelasikan dengan *Stewardship Theory*, seorang *steward* (pemerintah) idealnya mengalokasikan belanja modal untuk membangun aset tetap guna memberikan utilitas jangka panjang bagi masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, pengeluaran belanja modal berskala besar menyedot likuiditas kas daerah dalam jumlah masif. Dampak dari pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung memerlukan waktu (*time lag*) yang cukup lama sebelum mampu menghasilkan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian regional dan penerimaan daerah kembali. Terlebih lagi, peningkatan aset tetap secara otomatis akan meningkatkan beban pemeliharaan dan penyusutan di masa depan, yang dalam jangka pendek membebani laporan realisasi anggaran daerah.

Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021–2024 yang dilakukan oleh Sapi'i et al., (2026) menunjukkan bahwa belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan, begitu juga studi di Kota Surabaya yang dilakukan R. A. Putri & Wiryanto (2021) oleh menyatakan bahwa struktur belanja lebih condong ke belanja operasi daripada belanja modal. Setelah anggaran belanja modal yang tinggi dialokasikan pada tahap awal pembangunan daerah, efisiensi kas dan rasio keserasian belanja menurun dalam jangka pendek. Namun, setelah aset tersebut beroperasi penuh untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, efisiensi kas akan meningkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), penelitian ini menemukan bahwa variabel Efektivitas PAD memiliki nilai *coeficient* 0.321628 dan *probability* $0.0126 < 0.05$ yang berarti variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Namun, variabel Efisiensi Anggaran, yang memiliki nilai *coeficient* 0.586609 dan *probability* 0.1188 yang lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa Efisiensi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa upaya penghematan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata dari penghematan pada kinerja keuangan daerah. Namun, variabel Belanja Modal dengan nilai *coeficient* -2.809159 dan *probability* 0.0000, menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, karena pengorbanan likuiditas kas untuk investasi aset tetap, peningkatan alokasi belanja modal dalam jangka pendek akan menurunkan capaian kinerja keuangan daerah, akan tetapi dalam jangka panjang, pengeluaran ini dapat berdampak positif melalui efek pengganda terhadap perekonomian dan penerimaan daerah. Secara simultan, hasil Uji F menunjukkan bahwa Efektivitas PAD, Efisiensi Anggaran, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan nilai *F-statistic* sebesar 52.28738 dan *probability* 0.000000 yang jauh lebih kecil dari 0.05. Kekuatan model penelitian ini juga tercermin dari nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.922437 atau 92,24%, yang menunjukkan bahwa variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mampu dijelaskan secara simultan oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 7,76% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *agency theory*, *stewardship theory*, dan *signalling theory* sangat penting untuk menjelaskan bagaimana pengelola

keuangan daerah berfungsi sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk informasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, transparansi dan pelaporan keuangan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan akuntabilitas, akan tetapi hubungan antara keduanya masih diperdebatkan (Connelly et al., 2025; Hausteine & Lorson, 2023). *Stewardship Theory* melengkapinya dengan menekankan kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aparatur sebagai *steward*, sehingga kinerja keuangan ditentukan oleh internalisasi nilai penata layanan serta pengawasan (Komala & Ihyani, 2025). Menurut perspektif *Signalling Theory*, capaian kinerja keuangan, termasuk pelaksanaan PAD, menunjukkan kualitas tata kelola kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Siinyal harus dapat diamati dan sulit ditiru oleh pihak yang tidak berkualitas agar kredibel (Connelly et al., 2025). Kebijakan harus memprioritaskan penguatan basis pajak dan retribusi serta penetapan target PAD yang realistis berdasarkan potensi riil daerah. Belanja modal memerlukan perhatian jangka panjang, karena manfaatnya terhadap kinerja keuangan tidak muncul secara instan dan bergantung pada pemanfaatan aset. Tidak ada PAD yang meningkat jika aset tetap digunakan secara tidak efektif atau tidak sesuai dengan potensi lokal. Sehingga manfaatnya terhadap kinerja keuangan dapat terealisasi dalam jangka panjang, perencanaan belanja modal sebaiknya didasarkan pada pemetaan potensi wilayah, kesesuaian aset dengan kebutuhan, dan kualitas aset. Keterbatasan utama pada penelitian ini terletak pada rentang waktu pengamatan penelitian, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika kinerja keuangan daerah lebih dalam. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada ketersediaan data laporan keuangan terbaru dikarenakan publikasi laporan keuangan resmi (*audited*) membutuhkan waktu untuk dirilis secara publik, sehingga data tahun anggaran paling mutakhir belum dapat diakses dan dimasukkan ke dalam model penelitian saat analisis dilakukan. Hal ini membuat peneliti memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal serta penyesuaian regulasi keuangan daerah paling baru belum dapat terevaluasi secara optimal. Secara praktis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang rentang waktu pengamatan dengan mengintegrasikan data laporan keuangan tahun anggaran yang paling baru. Langkah ini penting untuk menguji apakah efek pengganda (*multiplier effect*) dari Belanja Modal dapat terealisasi seiring berjalannya waktu dan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan daerah di masa mendatang. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan sampel terutama periode yang digunakan dalam penelitian dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Perluasan cakupan sampel dan penggunaan data terbaru ini diharapkan mampu meningkatkan generalisasi hasil penelitian serta memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait pengelolaan keuangan daerah.

5. PERNYATAAN TERTULIS

5.1 Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: S. P., R., dan I. G. M.;

Metodologi: S.P., dan R.;

Perangkat Lunak: S. P.;

Validasi: S. P., R., dan I. G. M.;

Analisis Formal: S.P.;

Investigasi: S. P.;

Sumber Daya: S. P.;

Kurasi Data: S. P.;

Penulisan Draft Awal: S. P.;

Penulisan, Peninjauan, dan Penyuntingan: S. P., R., dan I. G. M.;

Visualisasi: S. P.;

Supervisi: R., dan I. G. M.;

Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang diajukan untuk publikasi.

5.2 Ketersediaan Data

Data yang mendasari penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi dan dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian. Data pendukung yang tersedia dapat diperoleh dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

5.3 Pendanaan

Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan eksternal.

5.4 Pernyataan Dewan Peninjau Institusional

Tidak berlaku (*Not applicable*). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung.

5.5 Pernyataan Persetujuan Berdasarkan Informasi

Tidak berlaku (*Not applicable*). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer dari partisipan manusia.

5.6 Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial maupun hubungan pribadi yang diketahui dapat mempengaruhi pelaksanaan pelaporan penelitian ini.

5.7 Penggunaan AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Publikasi

Teknologi AI generatif digunakan secara terbatas sebagai alat bantu dalam pencarian dan penelusuran artikel yang relevan dengan topik penelitian serta parafrase pada bagian tertentu dari naskah. Penggunaan AI tidak mencakup keseluruhan proses penyusunan manuskrip. Seluruh informasi dan hasil yang diperoleh melalui bantuan AI ditinjau kembali dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas substansi ilmiah, analisis, interpretasi, dan versi akhir manuskrip.

REFERENCES

- Anwar, & Nursan, M. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviews*. Pustaka Bangsa. <https://pustakabangsa.com>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Reutzel, C. R., DesJardine, M. R., & Zhou, Y. S. (2025). Signaling Theory: State of the Theory and Its Future. *Journal of Management*, 51(1), 24–61. <https://doi.org/10.1177/01492063241268459>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP). (2026). Data Hasil Realisasi APBD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13363>
- Fahmi, M., Ningrum, K. Y., Mariana, D., & Rivaldi, U. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 19(2), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/eksos.v19i2.575>
- Fitriadi, Mir, & Hokum, A. (2025). The Effect of Allocation Fund and Regional Revenue on Fiscal Independence: Evidence from Murung Raya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1853–1864. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4522>
- Greene, W. H. (2020). *Econometric Analysis* (8th ed.). Pearson Education Limited.
- Haq, A. I., Masdar, R., A, M. I., & Betty. (2025). The Effect of Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund on Capital Expenditure of Regencies and Municipalities in Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(12), 2187–2198. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.035.112.p14>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950–2962. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Hattke, F., & Vogel, R. (2023). Theories and theorizing in public administration: A systematic review. *Public Administration Review*, 83(6), 1542–1563. <https://doi.org/10.1111/puar.13730>
- Haustein, E., & Lorson, P. C. (2023). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 375–393. <https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local Government Financial Performance and Decentralization in Indonesia. *State and Local Government Review*, 58(2), 206–227. <https://doi.org/10.1177/0160323X251364379>
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- I Gede Sudi Adnyana, Cynthia Febrianti, F. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Surplus/Defisit Laporan Keuangan Pada Ketahanan Fiskal Pemerintah Studi Kasus Kota/Kabupaten di Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 141–152. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1266>
- Jannah, M., Haliah, & Nirwana. (2025). Transparency and accountability in local government financial reporting: A systematic literature review. *Social Sciences Insights Journal (SSIJ)*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.60036/mcdegf56>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, 14(2), 146–167. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Komala, R., & Ihyani, L. (2025). Purbaya Effect dan Tertib Anggaran Publik dalam Perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH)*, 11(4), 388–398. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.979>
- Lestari, M. P., Triani, M., Nugroho, Y. A., & Fiorintari, F. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 19–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jak.v13i1.2698>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAQBAJ>
- Nuraini, I., & Saleh, M. (2023). Peran Belanja Modal Sebagai Efek Mediasi Pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *DIMENSI*, 12(1), 346–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/dms.v12i1.5683>
- Oktaviani, E., & Marini, Y. (2023). Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2), 97–105. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2964>
- Oktavianty, N., Desyana, G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep Value for Money. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(1), 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Pratiwi, N. K. N., Kusumawati, N. P. A., & Erlinawati, N. W. A. (2022). Pengaruh Financial Governance, Peran Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Se-Kecamatan Mengwi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, Edisi Janu*, 203–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2299>

- Putri, R. A., & Wiryanto, R. B. D. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3), 395–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i3.4460>
- Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public Sector Accountability and Performance: The Influence of Institutional Scale, Legislative Oversight, and Supreme Audit Judgements. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(6), 1752–1771. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.035.106.p17>
- Putri, S. A., Widiarti, & Nurvazly, D. E. (2025). Kajian Model Regresi Data Panel pada Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 13(01), 117–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/mathunesa.v13n1.p117-124>
- Rahman, A. Z. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>
- Rowanda, A., & Ismiwati, B. (2026). Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 7(2), 302–313. <https://doi.org/10.47065/jbe.v7i2.9888>
- Sapi'i, M. I., Fauzan, M., & Aprilian, Y. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2021-2024. *AMBER: Accounting, Management, and Business Economic Review*, 1(2), 258–269. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/amber/>
- Saputra, J. K. (2026). Stewardship Anggaran Sebagai Kewajiban Moral: Perspektif Etika Publik Atas Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*, 5(3), 1955–1962. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mude.v5i3.11888>
- Saputra, M. S., & Priyastwi. (2026). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 14(1), 39–43. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13325>
- Sikora-Fernandez, D., & Stawasz, D. (2024). Public Information Asymmetry and Its Impact on Urban Governance Efficiency. *European Research Studies Journal*, XXVII(S2), 403–415. <https://doi.org/10.35808/ersj/3700>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Cet.27). Alfabeta.
- Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Akrual Jurnal Bisnis & Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 82–96. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.618>
- Tifani, D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2023). Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Bima. *Jurnal Risma*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.363>
- Wahyudi, L. M., & Astuti, E. (2026). Fiscal Performance Analysis of Local Government through an APBD-Based Financial Ratio Approach: Empirical Evidence from East Kalimantan Province, Indonesia (2020-2024). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(3), 14657–14667. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i3.11925>
- Yusmita, F., & Kurniawan, A. (2026). Unveiling Digital Transparency: Internet-Based Financial Reporting Disclosure by Indonesian Local Governments. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 6(1), 150–157. <https://doi.org/10.47709/brilliance.v6i1.8443>